

## Rapid Test bagi Para Santri

**PURWOREJO (KR)** - Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Purworejo bakal melakukan rapid test terhadap para santri yang datang dari daerah merah dan hitam. Sebelum sebelum masuk pondok pesantren (ponpes), pengasuh dan lingkungan ponpes juga harus bersih. "Mari kita buktikan bahwa ponpes tidak akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19, kalau di desa dan kampung ada joko tonggo, maka di ponpes juga harus ada joko santri," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Purworejo dr Sudarni MM, Senin (20/7). Dalam sosialisasi penyelenggaraan pendidikan Ponpes dalam new habit atau kebiasaan hidup baru di ruang Arahawang Kantor Bupati Purworejo Sudarni meminta, sebelum memulai proses pendidikan tatap muka, ponpes diminta melakukan berbagai persiapan adaptasi new habit sesuai protokol kesehatan. Sosialisasi diikuti 38 orang pengasuh ponpes yang dipilih dari 134 ponpes yang ada di Kabupaten Purworejo.

Pada kesempatan itu Kepala Kantor Kemenag Purworejo Drs Bambang Sutjipto MPd menambahkan, bahwa pendidikan ponpes harus mempersiapkan diri memasuki tahun ajaran baru dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pendidikan jangan sampai mandeg, karena merupakan sumbu kehidupan. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan Covid-19, namun jangan sampai lengah agar tidak terpapar, katanya. Ada beberapa persyaratan sebelum memulai proses tatap muka di ponpes, antara lain harus membentuk gugus tugas, memenuhi fasilitas protokol kesehatan, pengasuh dan peserta didik dalam kondisi sehat. "Ponpes yang akan buka, harus berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid-19," jelasnya. (Nar)-o

## Unwidha Gelar Seminar Geografi Digital

**KLATEN (KR)** - Universitas Widyadarmas (Unwidha) Klaten menggelar seminar Pembelajaran Geografi Digital untuk edukasi generasi milenial 'Siap Kerja', Sabtu (18/7) di aula gedung pascasarjana. Kegiatan menghadirkan nara sumber Prof Dr Suratman Woro Suprojo MSc (pakar geografi Universitas Gadjah Mada), Drs Sutrisno MPd (pembina MGMP geografi Kabupaten Klaten), dan moderator Dr Norma Yuni Kartika MSc MPd (dosen PS Geografi Fisip Universitas Lambung Mangkurat). Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara MGMP Geografi Kabupaten Klaten dengan Dekan FKIP, dilanjutkan penandatanganan memorandum of agreement (MoA) antara MGMP dan kepala Progdip Pendidikan Geografi. Rektor Unwidha Prof Dr Triyono MPd mengemukakan, dalam kerja sama tersebut Unwidha fokus pada Tri Dharma. Yakni pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat khususnya terkait masalah geografi.

"Hari ini diawali seminar dengan menghadirkan Prof Suratman, pembina MGMP dan alumni pendidikan geografi yang kini menjadi dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Tema pembelajaran geografi digital untuk edukasi milenial yang siap kerja," kata Prof Triyono. (Sit)-o

## Polines Sukses Ciptakan Robot Tenaga Medis

**SEMARANG (KR)** - Tim robotik Politeknik Negeri Semarang (Polines) berhasil menciptakan robot pengganti tenaga medis untuk melayani pasien Covid-19. Robot yang diberi nama Robot Asisten Medis Autonomus (RAMA) berbentuk seperti rak makanan yang biasa digunakan suster mengantar makanan dan obat-obatan di rumah sakit.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Minggu (19/7) menyampaikan robot rak makanan itu bisa berjalan sendiri sehingga aman saat mengantarkan kebutuhan pasien penyakit menular seperti Covid-19. Robot tersebut pertama kali diperkenalkan kepada Ganjar Pranowo di rumah dinasnyanya.

Ganjar Pranowo mengatakan pertamakali meli-

hat robot RAMA, tidak menduga kalau rak makanan itu adalah robot. Semula Ganjar mengira robot yang diciptakan dan akan diperkenalkan pada dirinya, robot yang lengkap dengan kaki, tangan dan kepala.

"Ini robotnya, saya kira robot seperti yang biasanya itu. Ada kaki dan kepala," ujar Ganjar Pranowo.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur minta kepada tiga mahasiswa pencipta robot tersebut (Abbas Kiarostami Permana, Ainur Rofik dan Wahyu Hidayat) untuk mendemonstrasikan. Setelah dihidupkan dan dikontrol melalui remot, robot RAMA bisa berjalan sendiri ke sejumlah tempat dengan sukses. Selain bisa mengantar

makanan, obat-obatan dan kebutuhan pasien, RAMA juga dilengkapi dengan tab yang bisa digunakan untuk komunikasi. Jadi, pasien dapat video call dengan perawat atau dokter melalui layar tab yang menempel di robot itu. Menurut Gan-

jar, melihat bentuk dan fungsinya, nama yang paling pas adalah robot ater-ater (tukang hantar).

Abbas Kiarostami, salah satu mahasiswa pembuat robot RAMA mengatakan, ide pembuatan robot berawal dari keprihatinan ba-

nyaknya tenaga medis yang gugur saat menjalankan tugasnya melayani pasien Covid-19. Selain itu, penggunaan APD yang sangat tinggi membuat banyak rumah sakit kekurangan APD.

"Jadi kami berinovasi membuat robot ini agar kontak pasien dengan tenaga medis bisa dikurangi. Dengan robot ini, semua kebutuhan pasien bisa diantar tanpa harus bersinggungan langsung. Selain praktis dan aman, juga bisa mengurangi penggunaan APD," jelasnya.

Proses pembuatan robot memakan waktu sekitar sebulan dengan biaya riset sekitar Rp 25 juta. Diharapkan robot ini bisa segera digunakan untuk membantu tenaga medis yang bekerja melayani covid-19. (Bdi)-o



**Ganjar Pranowo (kanan) serius mencermati kondisi fisik robot RAMA buatan mahasiswa Polines Semarang.**

## KEPUTUSAN SIDANG TANWIR PPM DAN PPA

# PWM dan PWA Jateng Beri Dukungan Penuh

**SEMARANG (KR)** - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jateng mendukung penuh sejumlah poin keputusan sidang tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) dan Pimpinan Pusat Aisyiyah (PPA) yang digelar se Indonesia secara daring, Minggu (19/7).

Sidang Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nashir MSi dari Yogyakarta dan diikuti oleh PWM, PWA, Organisasi Otonom se Indonesia melalui jaringan internal zoom.

Salah satu keputusan sidang tanwir, pelaksanaan Muktamar diundur Juli 2022 dan dilaksanakan Muktamar tatap muka atau muktamar se-

perti yang sudah-sudah. Dalam sidang tanwir muncul 3 wacana pelaksanaan Muktamar dari berbagai PWM PWA se Indonesia, yaitu Muktamar dilakukan Desember 2020 secara daring, dilaksanakan 2021 secara daring atau melihat kondisi lebih lanjut, serta Muktamar biasa dengan ketemu tatap muka di 2022. Akhirnya sidang tanwir memutuskan Muktamar

dilaksanakan secara biasa bukan daring Juli 2022.

Hal itu disampaikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) H Tafsir MAG di sela-sela mengikuti sidang secara daring dari aula Lantai 7 Gedung Fakultas Kedokteran Unimus, Minggu (19/7) bersama Ketua PWA Jateng Dr Hj Umul Baroroh, Rektor Unimus Prof Dr Masrukhi MPd (tuan rumah PWM PWA

untuk mengikuti sidang secara daring dari Yogya) dan pejabat PWM PWA lainnya.

Menurut Tafsir, PWM dan PWA Jateng sebelumnya sudah melakukan konsultasi intensif dengan UMS sebagai tuan rumah Muktamar yang menginginkan pelaksanaan Muktamar dilakukan dengan tatap muka meski konsekuensinya harus diundur karena saat ini masih pandemi Covid-19.

"Kenapa kami menginginkan sidang biasa bukan daring karena sejumlah pertimbangan di

antaranya muktamar tidak sekadar milik pimpinan, membuat program kerja dan evaluasi program tetapi ada nilai-nilai lain secara sosiologis. Yaitu silaturahmi tatap muka yang kuat, inspirasi kuat dan ada motivasi kuat pula. Saat pulang dari muktamar masing masing akan pulang membawa semangat baru untuk pengembangan organisasi Muhammadiyah di daerahnya. Silaturahmi, inspirasi, dan motivasi serta semangat baru bagi persyarikatan ini tidak ada jika dilakukan secara daring," ujar Tafsir. (Sgi)-o



## KINERJA WAKIL RAKYAT TAK KENAL MENYERAH Di Tengah Pandemi, DPRD Salatiga Selesaikan 38 Raperda



**Ketua DPRD Salatiga menyerahkan Persetujuan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Perda (Properda) tahun 2020 kepada Wali Kota di ruang Bhinneka Tunggal Ika Sekretariat DPRD Kota Salatiga.**

**WABAH** penyebaran virus korona mengganggu sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini juga berpengaruh di Kota Salatiga. Namun tidak demikian halnya dengan kinerja anggota DPRD Salatiga. Mereka tetap getol dan bekerja keras membahas rancangan peraturan perda (raperda) dengan menerapkan protokol kesehatan covid19 selama persidangan.

Tidak kurang 38 raperda digarap oleh DPRD Salatiga di tengah pandemi covid 19 ini. Dalam pembahasan raperda ini dibagi menjadi tiga panitia khusus (pansus).

Ditambahkan bahwa dari 38 Raperda tersebut ada 6 Perda yang sudah ditanda tangani persetujuan bersama. 8 Perda masih dalam proses fasilitasi, sementara sisanya dalam proses

pembahasan dan ditargetkan Agustus 2020 seluruh raperda rampung.

Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit menjelaskan pembahasan puluhan raperda ini merupakan bentuk dari konsistensi wakil rakyat untuk bekerja keras meski ditengah situasi dan kondisi pandemi covid19. Selain tetap bekerja untuk membantu warga masyarakat terkait wabah virus korona ini, anggota DPRD

juga tetap menjalankan tugas pokok sebagai lembaga legislatif dengan berusaha merampungkan 38 raperda ini. Bahkan saat ini DPRD juga sedang mengevaluasi perda-perda yang telah diundangkan namun sudah tidak efektif lagi dan kedaluwarsa tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di Salatiga.

"Kami saat ini mem-

bahas raperda yang jumlahnya 38 raperda untuk kepentingan warga Salatiga ke depan. Langkah lain adalah mengevaluasi perda-perda yang sudah ada namun belum sempurna atau belum ada peraturan walikota untuk melaksanakan perda. Banyak kita temukan belum adanya perwali meskipun sudah diundangkan di lembaran daerah," tandas Dance Ishak Palit.

la mencontohkan seperti Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang penataan PKL sampai sekarang ini belum bisa diberlakukan karena Perwali nya belum diterbitkan. Dibutuhkan kesempatan gerak dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang mampu agar Perwali cepat diterbitkan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah

(Bapemperda) DPRD Salatiga, Agus Pramono mengatakan memang sudah waktunya untuk melakukan "bongkar" Perda untuk mengevaluasi dan mencari Perda yang sudah usang dan bahkan banyak menumpuk dan perlu pembenahan penyempurna serta pengkajian bersama. Agus mengatakan tidak semua Perda tidak ada perwali nya, sebab bisa terjadi satu Perda membutuhkan sampai 10 perwali karena kajian dari pasal-pasal nya.

Ketua Pansus 2 Raperda DPRD Salatiga, Bagas Ariyanto mengatakan timnya membahas 5 raperda mengatakan raperda yang digarap diantaranya adalah Raperda Bank Salatiga menjadi Perumda, kemudian PDAM menjadi Perumda, PDAU menjadi Perumda, Raperda Peny-

enggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Untuk Bank Salatiga, PDAM dan PDAU dibahas raperda ini karena amanah Undang-Undang,"kata Bagas Ariyanto.

Jauh lebih penting lagi adalah aplikasinya setelah Perda diterbitkan. Khusus Bank Salatiga diharapkan ke depan harus ada keperpihakan misalnya kepada UMKM. Kredit harus ada terobosan mengcover UMKM. Sedangkan yang PDAM, diharapkan dengan Perda baru ada peningkatan pelayanannya, karena masih ada wilayah yang belum tersentuh oleh PDAM. "Ke depan Bank Salatiga harus menyisihkan alokasi dana untuk mengcover dan membantu kredit UMKM dengan sistem bunga rendah seperti KUR sehingga bermanfaat dalam mengembangkan perekonomian di daerah khususnya Salatiga ini," tandas Bagas Ariyanto.

la juga berharap adanya sinergitas dalam bekerja antara DPRD dan Pemkot Salatiga untuk mengaplikasikan Perda agar bisa berjalan dengan optimal. "Semisal Perda sudah diterbitkan segera disusuli Perwali agar optimal," katanya.

Wakil Ketua DPRD Salatiga, Latif Nahari mengungkapkan bahwa Perda di Salatiga ini jangan sampai seperti lukisan dan menjadi hiasan di tembok saja. Melainkan harus bisa menjadi "kendaraan" bagi Pemerintah Salatiga dalam mengambil kebijakan yang serius untuk menata dan meningkatkan kesejahteraan warganya. "Jangan hanya digantung saja tanpa dilaksanakan dengan baik," jelas Latif Nahari.

Raperda Atas Inisiatif DPRD Tahun 2020, terdiri : Raperda Perkembangan Kependudukan dan Pem-

angunan Keluarga; -Raperda Penyediaan Ruang Usaha bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan; -Raperda Pemajuan Kebudayaan Kota Salatiga; -dan Raperda Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.

Raperda Atas Inisiatif Walikota Salatiga Tahun 2020, yaitu : -Raperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan; -Raperda tentang Retribusi Tempat Olahraga Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah; -Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender; -Raperda Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi; -Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; -Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2019-2039; -Raperda Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya; -Raperda Penyerahan Modal Daerah pada Bank Umum; -Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; -Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan; -Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan. -Terakhir adalah Raperda dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Kumulatif Terbuka Tahun 2020, Terdiri : -Raperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; -Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; -dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Advertorial Humas DPRD Salatiga/ Sus)

Dinas Kesehatan Kota Salatiga; -Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan; -Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; -Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal; -Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan; -Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; -Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; -Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2019-2039; -Raperda Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya; -Raperda Penyerahan Modal Daerah pada Bank Umum; -Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; -Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan; -Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan. -Terakhir adalah Raperda dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Kumulatif Terbuka Tahun 2020, Terdiri : -Raperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; -Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; -dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Advertorial Humas DPRD Salatiga/ Sus)